

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR
MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM TINJAUAN FIQH
SIYĀSAH DI KOTA MOJOKERTO**

TESIS



Fitri Ayuningtiyas

02040422010

Dosen Pembimbing 1 :

Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031000

Dosen Pembimbing 2 :

Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., MHI

NIP. 197404142008010000

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ayuningtyas
NIM : 02040422010
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin
Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Di Kota
Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2023

Saya yang menyatakan



Fitri Ayuningtyas

02040422010

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Fitri Ayuningtiyas
NIM : 02040422010
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin
Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasa* Di Kota
Mojokerto

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.

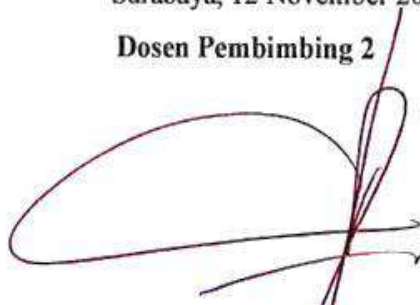
Surabaya, 12 November 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031000



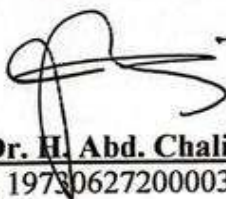
Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., MH
NIP. 197404142008010000

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Fitri Ayuningtiyas, NIM. 02040422010 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 30 November 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

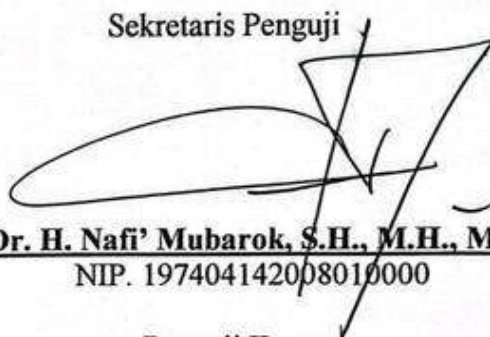
Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji




Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031000

Sekretaris Penguji



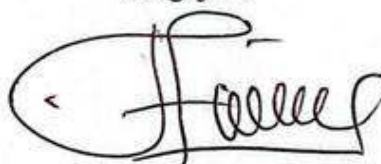
Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.HI
NIP. 197404142008010000

Penguji I



Dr. H. Priyo Handoko, SS, S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Surabaya, 30 November 2023

Mengesahkan,

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Direktur Pascasarjana,



Prof. H. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D
NIP: 197103021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitri Ayuningtiyas
NIM : 02040422010
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : fitry.ningtyas69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan *Fiqh Siyāsh* Di Kota Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2023



Fitri Ayuningtiyas

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Di Kota Mojokerto”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto oleh Dinas Sosial ?, dan 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah* ? Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan jenis penelitian empiris (penelitian lapangan). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara kesejahteraan, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori *wizarah*, serta teori *maqâshid al-syarîah hifz nash wa hifz nasl*. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan menggunakan pendekatan *socio legal studies*.

Hasil dari penelitian disebutkan bahwasannya, dalam melaksanakan program untuk menyentuh seluruh fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Kota Mojokerto dapat disebutkan bahwa Implementasi perlindungan hukum dan fakir miskin di Kota Mojokerto masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan, pengawasan, serta kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Kota Mojokerto. *fiqh siyāsah* jika dikaitkan dengan penelitian ini terkait dengan implementasi perlindungan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto dapat dikatakan bahwa penerapan peraturan daerah yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto harus lebih mengutamakan prinsip-prinsip islam dalam perumusannya. Dalam hal ini prinsip-prinsip islam dapat dikatakan seperti dijunjung tingginya hak asasi manusia.

Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan anak terlantar dengan merujuk kepada kebijakan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan kemiskinan terpadu merujuk pada teori negara kesejahteraan, perlindungan hukum, serta kewenangan. Dengan adanya rujukan program-program Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan bentuk negara kesejahteraan *social insurance welfare state*, serta Dinsos Kota Mojokerto yang merupakan penerima kewenangan mandat dari Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dalam bentuk *preventif*. Sedangkan Implementasi perlindungan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto dilihat dari kaca *fiqh siyāsah* harus berlandaskan kepada kemaslahatan umat. Dapat diuraikan bahwa implementasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial berdampingan dengan konsep *wizarah* dan *maqâshid al-syarîah hifz nafs wa hifz nasl*.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, *Wizarah*, dan *Maqâshid al-syarîah hifz nafs wa hifz nasl*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka Teoritik	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS NEGARA KESEJAHTERAAN, PERLINDUNGAN HUKUM, KEWENANGAN, WAZIRAH, DAN MAQÂSHID AL-SYARÎAH HIFZ NAFS WA HIFZ NASL	16
A. Teori Negara Kesejahteraan.....	16
1. Pengertian Teori Negara Kesejahteraan.....	16
2. Sejarah Negara Kesejahteraan	19
3. Bentuk-Bentuk Negara Kesejahteraan	20
4. Ciri-Ciri Negara Kesejahteraan.....	21
5. Konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia.....	22
B. Teori Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia	27
3. Aspek dan Unsur Perlindungan Hukum di Indonesia	28
4. Konsep Perlindungan Hukum di Indonesia.....	30
C. Teori Kewenangan.....	31
1. Pengertian Teori Kewenangan	31
2. Bentuk-Bentuk Kewenangan	33
3. Unsur-Unsur Kewenangan.....	36
4. Sifat-Sifat Kewenangan	37

D. Teori Fiqh <i>Siyāsah</i>	37
1. Wizarah.....	39
a. Pengertian Wazirah.....	39
b. Sejarah Wazirah.....	40
c. Bentuk-Bentuk Wazirah.....	42
2. Maqâshid al-syarîah Hifz Nafs wa Hifz Nasl.....	44
a. Pengertian Maqâshid al-syarîah Hifz Nafs wa Hifz Nasl.....	44
b. Sejarah Maqâshid al-syarîah.....	46
BAB III KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MOJOKERTO\	49
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	49
1. Profil Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	49
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	50
3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	51
4. Standart Operasional Perencanaan (SOP) dalam Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.....	52
B. Peta Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kota Mojokerto.....	54
1. Fakir Miskin.....	54
2. Anak Terlantar.....	57
C. Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.....	58
D. Kebijakan Dinas Sosial Kota Mojokerto Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.....	61
E. Bentuk Tanggung Jawab dan Upaya Dinas Sosial Kota Mojokerto bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.....	66
F. Hambatan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.....	71
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM TINJAUAN FIQH <i>SIYĀSAH</i> DI KOTA MOJOKERTO	74
A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Mojokerto Oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	74
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Kota Mojokerto Dalam Tinjauan Fiqh <i>Siyāsah</i>	88
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	107
PROFIL PENULIS	111

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

2. Buku

- A. Cahyat, Gönner, C, and M Haug. *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan Dengan Contoh Dari Kutai Barat Indonesia*. Bogor: CIFOR Indonesia, 2007.
- A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Al-Alukah, 2003.
- Abu 'abd allah Muhammad bin ismail al-bukhari. *Shahih Bukhari, Kitab Ahkam, Bab Qouillahi Ta'alaathi'ullah*, 2012.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Muyassar. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Alwi Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Bright Learning Center. *UUD 1945 Dan Amandemennya*. Yogyakarta: Bright Publisher, 2017.
- Collin Colbuid. *English Dictionary*. English: State Enterprises, 1997.
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Eny Kusdarini. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.

- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Ganjong. *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lamu Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*. Beirut: Dar Al-Jil, 1973.
- Imam Abu Ubaiad Al-Qasim. *Al-Amwal (Ekslopedia Keuangan Publik)*. Jakarta: Dema Insani, 2009.
- Islamul Haq. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Mac Iver. *The Modern State*. London: Oxford University Press, 1950.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.
- John J. Donohue dan Esposito. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Cet. II*. Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marbun S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, n.d.
- Miftachul Huda. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Moh. Mahfud MD. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Mohtar Mas'ood. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media, 2016.
- . *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Muhammad Solikhudin. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan maqâshid al-syar'iah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat: Konsep Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Nandang Alamsah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2010.
- Nezzi Amerta Saputri. "Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlanatar Perspektif Fiqh Siyāsah

- Dan Hukum Positif.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nur Basuki Winanmo. *Penyalagunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Dacrah*. Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- . *Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi*. Surabaya, 1998.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Pratiwi, Endang. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Journal Konstitusi* Volume 19, no. 02 (2022).
- R&D. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sarwat. *Maqâshid al-syarîah*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Siswo Yudo Husodo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pengantar Press, 2006.
- Soedijarto. *Pancasila Sebagai Filsafat Dasar Dan Ideologi Negara Kebangsaan Dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wahbah AL-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*. Damascus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Jurnal

- A.U Jafar. “Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar ’Iyyah.” *Journal of politik islam* Volume 3, no. 1 (2022).
- Andi Herawati. “Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam.” *Jurnal Hukum Diktum* Volume 11, no. 1 (2013).
- Anis Ni’am Imana. “Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016.” *Al-Intaj* Volume 5, no. 2 (2019).
- Badruddin. “Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of hukum islam* Volume 19, no. 02 (2019).

- Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, no. 23 (2016).
- Gatot Sapto Heriyawanto dan Mila Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Journal For Gender Mainstreaming* Volume 14, no. 2 (2020).
- Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia." *Journal Unikom* 13, no. 01 (2018).
- Ida alifatin dan Oksiana Jatiningih. "Strategi Pengentasan Anak Jalanan Di Kabupaten Mojokerto." *Journal of Moral dan Kewarganegaraan* Volume 03, no. 04 (2016).
- Imam Sukadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 5, no. 2 (2013).
- Iskandar Hosein. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Of hukum* Volume 1, no. 1 (2003).
- Kuntarno Noor Aflah. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf* Volume 4, no. 1 (2017).
- Marsudi Dedi Putra. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Ilmiah* Volume 23, no. 2 (2021).
- Miskari. "Politik Hukum Islam Dan *Maqâshid Al-Syarîah*." *Journal of Al Ijarah* Volume 4, no. Nomor 1 (2019).
- Mochammad Adib Zain. "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia." *jurnal Penelitian Hukum* Volume 1, no. 2 (2014).
- Mujib Amar Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Terlantar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Universitas Andalas, 2023.
- Mukhammad Aji Pamungkas. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Di Kota Mojokerto." *Journal Of Kebijakan Publik* Volume 1, no. 1 (2022).
- Oman Sukmana. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan." *Journal of Sospol* Volume 2, no. 1 (2016).
- Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang." *Jurnal Pro Justisia Yuridika* Volume XII, no. 05 (1997).
- Rudi kurniawa, dkk. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara." *Journal of Public* Volume 01, no. 01 (2020).
- satjipto Raharjo. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah." *Journal of Masalah Hukum* (2016).
- Vheny Michele. "Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Miskin.” *Journal of lex privatum* Volume VII, no. 3 (2022).

4. Webpage

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://dinsos.mojokertokota.go.id/> (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023)

<https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821021003/terjaring-razia-dinsos-kota-mojokerto-gelandangan-dan-anak-terlantar-ditangkap-lalu-dilepas> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023)

<https://adjar.grid.id/read/542972260/konsep-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-dan-wujudnya?page=all> (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023)

5. Interview

Bapak Khoirul Anwar (Ketua Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Ibu Iva (Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Bapak Luqman (Sekretaris Bidang P3A (Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Bapak Kacung (Staf Bidang Bina Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Ibu Weti (Staf Koordinasi Bidang Dinas Sosial Kota Mojokerto)

Abdul Majid (Golongan Fakir Miskin di Kota Mojokerto)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A